

Gubernur Ingin Bali Raih Opini WTP yang Berkualitas

Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, meraih opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) yang berkualitas.

Koster menyebutkan sejumlah upaya perbaikan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk membuat LKPD Bali berkualitas.

“Opini WTP atas laporan keuangan memang bukan merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan proses dari tahapan tertentu untuk mencapai suatu akuntabilitas dari seluruh proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara,” kata Koster saat menyampaikan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 di Gedung BPK Perwakilan Bali, di Denpasar, Rabu.

Opini WTP, lanjut dia, merupakan ukuran akuntabilitas dari pengelolaan keuangan yang ada

di masing-masing entitas sehingga dengan opini inilah akan dapat mengukur proses akuntabilitas di suatu entitas tertentu.

Untuk itu, dia meminta kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta tetap berpijak pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), khususnya kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Gubernur Bali beserta jajarannya yang telah menyerahkan LKPD lebih cepat 20 hari dari batas waktu akhir Maret 2020.

Sri Haryoso mengatakan laporan keuangan yang diterima BPK tersebut telah dilakukan “review” sebelumnya oleh Inspe-



Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto (Antaraneews Bali/Pemprov Bali/2020)

ktorat sehingga diharapkan tidak menemui banyak masalah.

“Dalam penyampaian hasil pemeriksaan keuangan nantinya BPK tidak hanya akan menyampaikan informasi terkait laporan keuangan dan kepatuhan kepada peraturan yang ada. Namun, akan menambahkan terkait informasi perkembangan ekonomi makro serta kinerja anggaran/kinerja keuangan,” ujarnya.

Dalam waktu 60 hari atau sekitar pertengahan Mei 2020, BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan yang akan disampaikan di DPRD Provinsi Bali.

Ke depan, dia berharap kerja sama serta komunikasi yang baik tetap terjalin sehingga BPK akan bisa bekerja lebih objektif dan mempercepat pemeriksaan. (ant)

Wagub Bali Minta Hotel Tidak PHK Karyawan



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa (Antaraneews Bali/Ni Luh Rhisma/2020)

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta pengusaha perhotelan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja meski saat ini kunjungan wisatawan mulai menurun karena penyebaran COVID-19.

“Hotel-hotel yang terdampak sudah mulai melakukan pengaturan jam kerja. Dari yang liburanya seminggu sekali

menjadi dua kali seminggu karena memang tamunya tidak ada,” kata Wagub Bali yang akrab dipanggil Cok Ace saat menggelar rapat koordinasi pemulihan pariwisata Bali dengan berbagai asosiasi dan komponen pariwisata di Denpasar, Senin.

Cok Ace mengharapkan kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi pengusaha perho-

telan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, apalagi sektor jasa pariwisata telah menjadi tumpuan hidup bagi sebagian pekerja perhotelan.

Saat ini, tambah dia, hotel-hotel yang terdampak dari penyempitan kunjungan wisatawan, terutama yang berasal dari China, berada di kawasan Kuta dan Nusa Dua, Kabupaten Badung.

“Sejak penghentian penerbangan dari dan menuju ke China mulai 5 Februari lalu, ada hotel yang okupansinya drop hingga tinggal lima persen, dua persen bahkan nol,” kata Cok Ace yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Menurut Cok Ace, dari sekitar satu juta pekerja di sektor pariwisata di Bali, yang sudah terkena imbas sekitar 20 persen, karena tingkat okupansi hotel rata-rata turun hingga 70 persen dari kondisi normal.

Hotel-hotel yang cukup bertahan, lanjut dia, umumnya

berada di kawasan wisata Sanur dan Ubud dengan dampak penurunan berada pada kisaran 15-20 persen.

Secara keseluruhan, Cok Ace mengharapkan sejumlah negara yang selama ini menjadi pemasok wisatawan ke Bali tidak lagi melarang warga negaranya untuk berwisata ke Bali.

Sementara itu, Managing Director ITDC I Gusti Ngurah Ardita mengatakan rata-rata tingkat hunian atau okupansi hotel di kawasan ITDC Nusa Dua hingga akhir Februari 2020 mencapai 56 persen.

“Januari sebenarnya cukup bagus, tetapi sejak penutupan penerbangan ke China pada 5 Februari sampai dengan sekarang, jadi tinggal 56 persen,” katanya.

Berdasarkan hasil pantauan, hotel-hotel di kawasan ITDC belum ada yang sampai melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pegawai. (ant)

Pemprov Bali Bentuk Satgas Penanggulangan COVID-19



Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kadiskes Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Rabu (11/3/2020) (Antara/Ayu Khania Pranisitha)

Pemerintah Provinsi Bali membentuk dan menyusun Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Virus Corona atau COVID-19 untuk meningkatkan kesiapsiagaan terkait dengan kasus COVID-19 di wilayah Bali.

“Dalam rangka meningkat-

kan kesiapsiagaan kita, Gubernur Bali sudah menandatangani keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan Virus Corona atau COVID-19 Provinsi Bali,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, didampingi

Kadiskes Bali dalam konferensi pers di Denpasar, Rabu.

Dalam pembentukan Satgas ini, pihaknya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 dengan lima satuan tugas yang sesuai dengan protokol COVID-19.

Ia menjelaskan dari lima satuan diantaranya Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area Publik dan Transportasi, kemudian ada Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik dan Satuan Tugas Pintu Masuk Indonesia.

“Iya, jadi saya sebagai Ketua Satgas, kalau Satgas Kesehatan ada Kadis Kesehatan bersama anggotanya, Satgas untuk area pendidikan ya Kadis Pendidikan dengan anggotanya, terus untuk publik dan transportasi itu Kadis Perhubungan, dan

Komunikasi Publik ada Kominfo, serta di Satgas Pintu Masuk ada KKP,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya berencana mengadakan rapat pada Jumat (13/3) bersama semua Satgas untuk menentukan langkah-langkah bersama dalam meningkatkan kewaspadaan terkait COVID-19 di Bali.

Ia mengatakan dalam tugasnya, seluruh Satgas turut melibatkan stakeholder dan bidang-bidang terkait untuk bersama-sama berperan dalam penanganan COVID-19.

“Kami harapkan bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif bagi kita di Bali supaya penanganan diri kita dilaksanakan dengan baik dan juga dampak yang tidak perlu terjadi supaya tidak terjadi,” ucapnya. (ant)

Bali Kejar Peringkat “Informatif” Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mengejar peringkat “informatif” keterbukaan informasi publik dengan mengupayakan berbagai langkah strategis dan memperbaiki sejumlah kekurangan.

“Capaian ‘menuju informatif’ yang telah diraih Pemprov Bali dalam penilaian keterbukaan informasi publik Tahun 2019 sebenarnya sudah cukup menggembirakan. Saya yakin, untuk mencapai predikat ‘informatif’ itu bukanlah sesuatu yang sulit,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menjadi pembicara utama pada acara ‘Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik’ di Denpasar, Selasa.

Untuk itu, melalui bimbingan teknis ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Bali diminta menyampaikan apa yang menjadi indikator dan kriteria penilaian serta kekurangan dari masing-masing PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

pembantu yang tersebar di perangkat daerah.

“Tayangkan apa yang masih menjadi kekurangan masing-masing. Selanjutnya mari bekerja konkret untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan itu. Itu yang ingin kita capai dari bimtek ini, tak sekadar memberi pengetahuan teknis pada peserta, namun lebih kepada informasi tentang kekurangan masing-masing,” ujarnya.

Ia berkeyakinan, dengan tekad serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, target Bali meraih predikat “informatif” akan bisa tercapai.

“Saya kira ini bukan barang sulit, ada daerah lain yang sudah berhasil meraih predikat informatif, berarti kita juga pasti bisa. Sama halnya seperti WTP, kita bisa mengejar daerah lain. Demikian juga dalam penilaian LAKIP,” katanya.

Di sisi lain, Dewa Indra menegaskan bahwa kunci utama dalam keterbukaan informasi publik adalah kesatuan pemahaman tentang kewajiban



Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (kiri) saat menjadi pembicara utama pada acara ‘Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik’ didampingi Kadis Kominfos Bali Gede Pramana (Antaraneews Bali/ Dok Pemprov Bali/2020)

pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Sekarang ini informasi adalah hak publik. Kewajiban bagi kita untuk memberikan. Apapun yang menjadi hak bagi publik, kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya,” ujarnya.

Namun dalam memberikan informasi, pemerintah hendaknya mengindahkan sejumlah hal yaitu informasi yang diberikan harus lengkap, cepat, benar, sumbernya haruslah dari orang

atau lembaga yang punya otoritas.

“Kalau masyarakat minta dalam dua hari, ya harus bisa kita penuhi. Kecuali peraturan perundang-undangan mengamanatkan kalau informasi itu tak boleh dibuka untuk publik,” ucapnya.

Sementara itu, Kadis Kominfos Bali Gede Pramana mengatakan dalam pemeringkatan badan publik se-Indonesia, Bali meraih peringkat “menuju informatif” dengan nilai 85,87. (ant)

Pemkot Denpasar Keluarkan Izin Lewat Aplikasi “Si Cantik Cloud”



DPMPTSP Denpasar terbitkan izin lewat aplikasi “Si Cantik Cloud” (AntaraneWS/Komang Suparta/IST/2020)

Pemerintah Kota Denpasar, Bali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus menggalang inovasi secara maksimal, khususnya percepatan proses penerbitan izin dengan menggunakan aplikasi “Si

Cantik Cloud”.

Kepala Dinas DPMPTSP Kota Denpasar Ida Bagus Benny Pidada Rurus di Denpasar, Selasa, mengatakan pihaknya secara berkelanjutan terus berinovasi guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Se-

belumnya beragam inovasi juga telah diluncurkan, mulai dari “Si Cantik Molek, Sipon, Tanda Tangan Digital dan Layanan SMS Gateway”.

“Dengan adanya sistem perizinan online (berjaringan) terintegrasi ini diharapkan lebih memaksimalkan pelayanan, khususnya bidang perizinan bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia mengatakan secara konsep inovasi tersebut nantinya terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di bidang perizinan. Seperti halnya Dinas Kesehatan, DLHK, serta OPD lainnya yang berhubungan dengan proses perizinan.

“Biasanya ketika mengajukan permohonan izin kita diminta untuk melengkapi persyaratan amdal dan rekomendasi dari OPD terkait, dengan sistem per-

izinan online terintegrasi ini seluruh rekomendasi dapat dilaksanakan secara online dan cepat dengan penerapan tandatangan digital,” ujarnya.

Tentunya, kata Benny Pidada, seluruh sistem perizinan online ini terintegrasi dalam satu wadah aplikasi yakni “Si Cantik Cloud”. Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan yang hanya melalui satu pintu. Untuk diketahui bahwa sepanjang tahun 2019, DPMPTSP Kota Denpasar telah menerbitkan sedikitnya 5.612 izin di berbagai bidang.

“Kami berharap dengan segala kemudahan perizinan ini dapat meningkatkan iklim positif investasi di Kota Denpasar sebagai upaya mendukung penguatan perekonomian daerah,” katanya. (ant)

Pemkot Denpasar Lakukan Langkah Mitigasi Sikapi COVID-19

Pemerintah Kota Denpasar, Bali mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melakukan mitigasi, penguatan ekonomi kreatif dan langkah-langkah antisipasi menyikapi dampak dari wabah virus corona.

Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara di Denpasar, Jumat, mengatakan pihaknya dalam rapat koordinasi tersebut melibatkan instansi terkait, organisasi perangkat daerah, puskesmas, kepala desa, dan lurah se-Kota Denpasar.

“Pemkot sudah melakukan rapat koordinasi dalam upaya menindaklanjuti terjadinya wabah virus corona. Langkah tersebut guna mengantisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan dengan kejadian tersebut berbagai langkah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dari penguatan ekonomi kreatif, menggalakan kunjungan wisata domestik, mengadakan kegiatan-kegiatan dan membuat SOP mulai dari pencegahan,

pengamatan pengawasan, pengecekan, edukasi hingga rujukan untuk memberi kepercayaan publik.

“Kami terus berkoordinasi guna memberi rasa nyaman kepada masyarakat serta wisatawan yang datang ke Bali, dari penanggulangan, pengawasan, hingga penguatan ekonomi kreatif serta promosi wisata agar dapat membentuk kepercayaan publik,” ujarnya.

Sekda Rai Iswara juga meminta masyarakat untuk tidak panik dan terus menjaga kesehatan. Seluruh perkantoran, restoran hingga hotel diminta untuk selalu menyediakan antisipatik tangan (hand sanitizer) yang dapat dipergunakan masyarakat atau pengunjung. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait untuk antisipasi berkurangnya stok sembako serta terjadinya lonjakan harga masker akibat dampak virus corona.

“Tentunya dengan kemungkinan terburuk yang terjadi kami rasa Denpasar siap menghadapi



Pemkot Denpasar siapkan langkah mitigasi terkait virus corona. (AntaraneWS/Komang Suparta/IST/2020)

jika ditemukan kasus COVID-19 tersebut, tetapi dalam hal ini masyarakat diharapkan jangan panik serta mengikuti prosedur yang ada dari pengecekan, penanggulangan dan mengambil langkah cepat dengan melapor ke call center 112 atau 223333 jika terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, Made Toya yang ditunjuk sebagai

Ketua Tim Mitigasi COVID-19 Kota Denpasar, menjelaskan berbagai upaya telah dikoordinasikan kepada pihak terkait dari pencegahan, penanggulangan hingga pengecekan harga pasar untuk mencegah penumpukan dan melonjaknya harga sembako.

“Kami rasa seluruh OPD telah siap berkolaborasi di dalam menghadapi dan mengantisipasi wabah virus tersebut,” ujarnya. (ant)

Disdukcapil Denpasar Adakan “Pelangi” Untuk Pendataan Dokumen Kependudukan



Staf Disdukcapil Denpasar melakukan pemotretan KTP-e di Denpasar, Selasa (10/3/2020) ANTARA/Komang Suparta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali mengadakan “Pelangi” (pelayanan langsung jadi) untuk pembuatan kelengkapan pendataan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar I Dewa Gede Juli Artabrata di Denpasar, Selasa, mengatakan pelayanan langsung jadi membuat KTP tersebut sebagai upaya memudahkan pelayanan kepada ma-

sarakat untuk memiliki data kependudukan salah satunya KTP elektronik.

“Kegiatan pelayanan langsung jadi yang lebih dikenal dengan ‘Pelang’ dimulai 10 Maret hingga 4 April 2020 dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan se-Kecamatan Denpasar Barat. Program baru yang dijalankan oleh Disdukcapil Kota Denpasar yang bertujuan untuk melengkapi administrasi data kependudukan dengan cepat dan tepat,” katanya.

Ia mengatakan dengan “Pelangi” tersebut diharapkan dapat menarik antusiasme masyarakat untuk melengkapi dokumen yang belum mereka miliki. Hal itu merupakan komitmen Pemerintah Kota Denpasar melalui Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakilnya Jaya Negara untuk memaksimalkan pelayanan publik di Kota Denpasar terus ditingkatkan.

Selain mengupayakan perekaman pada desa/kelurahan di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, juga melalui program jemput bola bagi masyarakat yang sakit dan tidak hadir pada kegiatan tersebut.

Sementara itu, Lurah Dauh Puri, I Gusti Ngurah Arnawa sangat mengapresiasi kegiatan “Pelangi” yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Denpasar. Pelaksanaan kegiatan “Pelangi” sangat membantu masyarakat dimana warga tidak



memerlukan waktu lama lagi untuk melengkapi data kependudukan di sela-sela kesibukannya.

“Masyarakat telah kami imbau untuk memanfaatkan kegiatan ‘Pelangi’ dengan sebaik-baiknya untuk melengkapi data kependudukannya,” ujarnya.

Seorang warga, Heru Handayanto yang ditemui setelah melaksanakan perekaman di Kelurahan Dauh Puri mengatakan “Pelangi” sangat baik dengan pelayanan yang cepat, setelah perekaman kurang dari menit menit sudah dapat diambil.

“Harapan saya semoga kegiatan yang baik ini semakin baik lagi, dan kegiatan tersebut selain di kelurahan diharapkan turun juga ke lingkungan-lingkungan warga,” ucapnya. (ant)

K3S Denpasar Bantu Kursi Roda Kepada Lansia/Disabilitas

Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Bali Ida Ayu Selly Mantra menyerahkan bantuan kursi roda kepada penyandang lanjut usia dan disabilitas dalam upaya meringankan beban mereka serta mempermudah aktivitasnya.

“Bantuan yang kami serahkan kepada penyandang lanjut usia atau lansia, dan disabilitas dalam upaya mendorong agar mereka tetap beraktivitas,” kata Selly Mantra di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan selain bantuan kursi roda, pihaknya juga menyerahkan tongkat kaki empat, alat bantu dengar hingga tongkat ketiak.

Kegiatan penyerahan bantuan kepada lansia dan disabilitas dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Utara. Dua lansia dan satu disabilitas menerima bantuan kursi roda

dan tongkat stroke. Mengawali kunjungan dan menyerahkan bantuan kursi roda di Desa Sumerta Kaja

“Terima kasih atas bantuan kursi roda kepada saya. Kursi roda ini sangat bermanfaat untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah,” ucap Jero Nyoman Soka.

Selly Mantra menambahkan dari penyerahan bantuan ini pihaknya ingin mengetahui secara langsung di lapangan keberadaan penyandang disabilitas dan lansia. Sehingga bantuan yang diserahkan dapat bermanfaat sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.

“Bantuan yang diserahkan kali ini merupakan kegiatan rutin K3S Kota Denpasar dengan menyerahkan bantuan kursi roda, dan alat bantu lainnya kepada penyandang disabilitas dan lansia,” ujarnya.

Ny. Selly juga menjelaskan



K3S Denpasar serahkan bantuan kursi roda lansia dan disabilitas. (AntaraneWS/Komang Suparta/1st/2020)

bahwa keberadaan K3S dengan programnya sudah diketahui seluruh masyarakat Denpasar, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung menghubungi K3S dan pihaknya turun memberikan bantuan.

Tidak saja memberikan bantuan kursi roda, tongkat dan alat bantu dengar, menurut istri Wali Kota Rai Dharmawijaya Mantra, juga memberikan ban-

tuan modal kerja bagi penyandang disabilitas yang memiliki usaha. Disamping itu pihaknya juga berinovasi memberikan ruang para disabilitas untuk berkarya, serta lewat FTV Widya “Jemari Jiwaku Menari” dan VCD mini Album “Tak Ada yang Sempurna” ingin menggerakkan masyarakat dan donatur untuk mengetahui keberadaan penyandang disabilitas di Kota Denpasar. (ant)

Wabup Badung Jelaskan Program PPNSB saat Rakerda PDIP Kepulauan Babel



Wabup Badung, I Ketut Suiasa menyampaikan materi saat menjadi keynote speaker Rakerda PDIP Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Sabtu (29/2). (Foto : Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik).

Wakil Bupati (Wabup) Badung, Bali, I Ketut Suiasa, kembali memaparkan implementasi program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) saat menjadi keynote speaker kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda PDIP) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), setelah sebelumnya, juga menjadi pembicara dalam Rakerda DPD PDIP Sumatera Barat.

Menurut keterangan Humas Pemkab Badung yang diterima di Mangupura, Badung, Minggu. Suiasa dalam paparannya mengatakan, PPNSB yang diimplementasikan di Badung merupakan wujud akuntabilitas, implementasi visi dan misi serta pemenuhan janji politik kepada seluruh masyarakat Badung.

Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana merupakan

konsep pemikiran pembangunan yang pernah diimplementasikan Presiden Ir Soekarno, tambahnya.

Menurutnya, konsep tersebut hingga saat ini masih bisa diaktualisasikan kembali karena berdasarkan landasan ideologis, filosofis dan sosiologisnya dianggap masih sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa kini dan masa depan.

Atas dasar itu, kami implementasikan PPNSB yang mencakup bidang pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, adat, agama dan budaya, jaminan sosial dan ketenagakerjaan serta pariwisata, dalam upaya mewujudkan ajaran Tri Sakti Bung Karno," jelas dia.

Dalam bidang kesehatan, menurut dia pihaknya telah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Dalam bidang pendidikan, siswa baru tingkat SD dan SMP yang bersekolah di

wilayah Badung juga diberikan seragam gratis baik sekolah swasta dan negeri.

Untuk bidang pendidikan, kami juga berikan laptop gratis yang bisa dimanfaatkan siswa untuk menunjang proses belajar mengajar, ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga memaparkan program yang dilakukan dalam bidang jaminan sosial, Pemkab Badung memberikan santunan lansia sebesar Rp1 juta per bulan dengan syarat penerima adalah warga Badung yang telah berusia 75 tahun atau bedridden yang telah mencapai usia 60 tahun yang sesuai dengan pasal 3 Perbup Nomor 48 Tahun 2019.

Intinya, PPNSB ini memberikan dampak positif, artinya PPNSB memang benar-benar terbukti untuk mensejahterakan masyarakat, dapat sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, jelasnya. (adv)

Badung Terapkan Pelayanan Publik Berbasis Daring/Online

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, telah menerapkan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis sistem secara daring atau online.

"Inovasi ini kami hadirkan untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit dan tidak transparan," ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menjadi pembicara Sosialisasi Standar Pelayanan Publik bagi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus dan Daerah Tujuan Wisata di kawasan Kuta, dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Kamis.

Menurutnya, dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, akan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau tentunya diikuti dengan

penguatan sumber daya manusia yang andal pula.

Ia menjelaskan, berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemkab Badung dalam bidang pelayanan publik juga menjadikan Badung sebagai salah satu pembina terbaik pelayanan publik di Indonesia.

"Dengan adanya 127 layanan online atau daring berbasis teknologi informasi yang kuat dan akurat serta tepat sasaran. Membuat pelayanan publik di Badung pada tahun 2019 meraih angka kepuasan publik terakhir 83,61 persen.

Suiasa menambahkan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administra-

tif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

"Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik juga telah diatur sepenuhnya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat tentu dengan cepat serta tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, inovasi dan terobosan-terobosan untuk memberikan pelayanan publik saat ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan berbagi informasi dengan Pemkab Badung itu diharapkan dapat menjadi ajang saling berbagi kiat-kiat dan terobosan pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi, tidak saja



Wabup Badung, I Ketut Suiasa. (Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik)

terkait pelayanan publik namun juga di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kependudukan untuk dapat menjadi motivasi bersama.

"Kami berharap dengan berbagi ini dapat memberikan dan menambah apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing daerah sesuai dengan inovasi yang dikembangkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya. (adv)

Agro Techno Park Badung Padukan Pariwisata Dengan Pertanian



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (tengah) didampingi Kepala Balitbang I Wayan Suambara dan Kadis Pertanian Wayan Wijana memimpin rapat koordinasi pembahasan hasil penyusunan DED dengan seluruh tim konsultan dari Universitas Udayana di Puspem Badung, Rabu (4/3). *Antaraneews Bali/HO-Humas Badung/fjk*

Salah satu program Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, yaitu Agro Techno Park (ATP) yang pembangunannya berlokasi di Desa Belok Sidan dengan luas lahan 14,8 hektare, akan memadukan industri pariwisata dengan pertanian khususnya di wilayah Badung Utara.

“Pembangunan ATP ini akan kami integrasikan dengan objek wisata Yeh Panas Penikit, Dam Sidan serta Taman Bumi Banten di

kawasan Pura Pucak Tedung Sulangai sehingga tercipta kawasan agro dan ekowisata terpadu di Badung Utara,” ujar Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat Rakor Pembahasan Hasil Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dengan tim konsultan dari Universitas Udayana, di Mangupura, Rabu.

Melalui ATP, Pemkab Badung akan mengembangkan sektor per-

tanian di wilayah Badung Utara yang merubah paradigma dari pola pertanian konvensional menuju pola pertanian modern dengan penerapan teknologi tepat guna.

Di dalam kawasan ATP juga akan dibangun taman bunga, tempat pengolahan kopi dari hulu ke hilir, laboratorium pertanian, tempat perkemahan, ruang pertemuan, panggung terbuka dan sejumlah fasilitas lainnya.

Apabila pengunjung ingin berwisata menikmati panorama alam sekitar di kawasan ATP, pihak pengelola rencananya juga akan menyediakan sistem transportasi terpadu.

Terkait rencana itu, bupati mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan sinergitas guna mendukung proses pembangunan ATP.

Selain itu, ia menekankan kepada OPD terkait untuk menerapkan sistem pengawasan yang

ketat selama proses pembangunannya, sehingga pembangunan ATP dapat terlaksana dan membuahakan hasil yang maksimal.

“Saya juga mengharapkan kami bisa segera membangun laboratorium pertanian di kawasan ATP, kalau itu terwujud kami akan datangkan tim ahli pertanian dari Jepang untuk mengkaji topografi wilayah yang meliputi pengecekan suhu, tingkat keasaman dan kesuburan tanah sehingga dari hasil itu bisa ditentukan komoditas apa yang cocok dikembangkan di wilayah Badung Utara, Tengah dan Selatan,” ujarnya.

Giri Prasta mengapresiasi laporan tim Universitas Udayana mengenai rencana pembangunan mulai dari penyediaan lahan, zonasi wilayah, rancang bangunan sampai masuk ke tahap pembahasan tentang rancangan biaya pembangunan ATP, karena secara global menurutnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan Pemkab Badung. (adv)

Pemkab Badung Siapkan “Badung Tourism Recovery” Sikapi COVID-19

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali bersama komponen pariwisata setempat menyiapkan konsep usulan kegiatan “Badung Tourism Recovery” guna meningkatkan sektor pariwisata di tengah terjadinya penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak COVID-19 atau virus corona.

“Kami setuju dengan konsep berbagai kegiatan pariwisata untuk tourism recovery. Namun, yang paling penting dan pertama harus dilakukan adalah memastikan penanganan virus dilakukan secara profesional sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),” ujar Sekretaris Daerah Pemkab Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat pertemuan koordinasi bersama komponen pariwisata di Mangupura, Rabu.

Standar prosedur operasional (SOP) penanganan dan pengawasan terkait dengan COVID-19, menurutnya, juga

penting untuk terus dilakukan di pintu-pintu masuk Pulau Dewata, seperti di bandara maupun pelabuhan.

“Kemudian, berbagai aktivitas SOP penanganan kasus virus Corona ini juga sangat penting untuk nantinya dibuatkan suatu video dan selanjutnya dapat diinformasikan kepada wisatawan bahwa Bali dan Badung sudah siap menangani virus ini agar tidak ada kekhawatiran mereka untuk berkunjung ke Bali,” katanya.

Ia menambahkan perlunya dilakukan kerja sama dengan media asing agar informasi yang ada di Bali, khususnya Badung, dapat dipublikasikan sehingga ada keyakinan bagi wisatawan bahwa Bali aman dikunjungi.

Selain dihadiri Sekda Adi Arnawa, kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Badung, I Made Badra, Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) berbincang dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho (kanan) saat pertemuan koordinasi bersama komponen pariwisata Badung di Mangupura, Rabu (4/3/2020). *ANTARAI/Fikri Yusuf*

Bali Trisno Nugroho, Ketua DPW Nawa Cita Pariwisata Indonesia Bali Agus Maha Usadha.

Pihaknya mengapresiasi kehadiran komponen pariwisata, termasuk dari unsur penerbangan dan Bank Indonesia, untuk bersinergi dalam membahas langkah-langkah yang harus dilakukan setelah merebaknya virus corona.

“Kondisi virus ini sangat dilematis, di satu sisi kami berkumpul untuk bagaimana berusaha melakukan mendorong wisatawan datang ke Indonesia,” ungkap dia.

Kadisparada Badung, Made Badra, mengatakan pihaknya membuat konsep kegiatan tersebut, untuk mengantisipasi dampak merebaknya virus corona. (adv)

Pemkab Blora Pelajari Pelayanan Publik Pemkab Badung



Kepala DPMPTSP Badung Agus Aryawan memberi penjelasan saat menerima kunjungan kerja Pemkab Blora Jawa Tengah di Badung, Kamis (5/3). *Antaraneews Bali/HO-Humas Badung/fik*

Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mempelajari proses pelayanan publik yang dilaksanakan Pemkab Badung, Bali, dengan melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung.

“Kami mengunjungi MPP DPMPTSP Badung dalam rangka belajar tentang pelayanan publik, mengingat MPP Badung ini merupakan yang terbaik di

Indonesia yang menjadi rekomendasi Kementerian PAN-RB,” ujar Sekretaris Daerah Blora, I Komang Gde Irawadi, di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, kunjungan itu juga dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggali informasi serta belajar berbagai program unggulan dan inovasi tentang pelayanan publik yang dimiliki Pemkab Badung.

Kunjungan itu juga diharap-

kan dapat memotivasi pejabat pelaksana pelayanan publik di Kabupaten Blora agar dapat meniru pola pelayanan publik yang telah diterapkan oleh pemerintahan Badung.

“Kami berterima kasih atas penerimaan yang sangat baik oleh jajaran Pemkab Badung dalam kunjungan kami ke Mal Pelayanan Publik ini,” ungkap Komang Gde Irawadi.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, memaparkan sejumlah hal yang dibutuhkan dalam proses pembentukan MPP, mulai dari penyiapan regulasi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen pelayanan publik.

Ia berpesan, apabila Pemerintah Kabupaten Blora, apabila ingin membentuk Mal Pelayanan Publik agar menyiapkan segala sesuatunya dengan matang dulu.

“Jangan pernah meluncurkan MPP dalam kondisi yang tidak

siap, karena potensi kegagalan ditengah jalan sangat besar. Karena pengelolaan MPP membutuhkan komitmen dedikasi dan integritas yang tinggi, mengingat semua hal yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan publik harus dijalankan secara simultan dan terpadu,” kata Agus Aryawan.

Ia menambahkan, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, juga menerbitkan Peraturan Bupati tentang nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan instansi apa saja yang terlibat dalam pelayanan di MPP Badung.

Menurutnya, yang menjadi inti pada pelayanan publik Badung adalah perizinan dan investasi karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemudahan dalam hal proses perizinan dan investasi.

“Dengan pertumbuhan investasi yang meningkat, kami yakin juga akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya. (adv)

BPS Badung Lakukan Pendampingan SP 2020 di Kawasan Pariwisata

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Bali, bersinergi dengan pelaku pariwisata melakukan pendampingan pengisian data Sensus Penduduk (SP) Online/daring 2020 kepada pekerja di kawasan pariwisata yang ada di kawasan Legian.

“Kegiatan ini merupakan pendampingan pertama kepada pegawai hotel yang diisi dengan sosialisasi cara pengisian SP Online yang diikuti oleh karyawan The ONE Legian & Hotel Vila Lumbung,” ujar Kepala BPS Badung I Putu Minarni, dalam keterangan pers Humas Pemkab Badung yang diterima Antara di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan, tahun ini BPS melakukan sensus penduduk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga proses pengisian data menjadi lebih mudah apabila dilakukan secara daring.

Untuk dapat melakukan Sensus Penduduk secara daring, menurutnya, masyarakat cukup menyiapkan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan.

“SP Online telah dimulai pada 15 Februari lalu hingga 31 Maret mendatang dengan cara mengakses website sensus.bps.go.id yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat dari manapun,” katanya.

Putu Minarni menjelaskan, ada dua tujuan utama dari pelaksanaan SP 2020, yaitu untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menurut de facto dan de jure menuju satu data kependudukan Indonesia.

Tujuan yang kedua, katanya, adalah untuk menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk serta karakteristik penduduk.



Suasana pendampingan pengisian data Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS Kabupaten Badung terhadap pegawai hotel The One Legian dan Hotel villa Lumbung bertempat di Ruang Pertemuan The ONE Legian & Hotel Villa Lumbung, Badung. *Antaraneews Bali/HO-Humas Badung/fik*

“Data yang kami hasilkan bergantung pada respons aktif dari masyarakat. Data ini sangat bermanfaat, siapa yang menguasai data adalah menguasai dunia,” ucapnya.

Kepala Seksi Statistik Kependudukan BPS Provinsi Bali I Ketut Monday yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan pihaknya mengimbau agar setelah kegiatan ini karyawan The ONE

Legian & Hotel Vila Lumbung dapat menularkan ilmu yang didapat dan menjelaskan manfaat data pengisian sensus penduduk ini kepada masyarakat sekitarnya.

“Dan bagi masyarakat yang belum mengikuti SP Online, nantinya akan didatangi petugas sensus yang akan melakukan SP wawancara pada bulan Juli mendatang,” ujarnya. (adv)

Badung Lakukan Ritual Mohon Terhindar Virus Dan Penyakit



Masyarakat mengikuti Upacara Nangluk Merana dan Mepekelem di Pura Mas Ceti Ulun Tanjung Petitenget, bertepatan dengan Purnama Kesanga, Senin (9/3). *Antaraneews Bali/Fikri Yusuf*

Masyarakat Kabupaten Badung, Bali, melakukan ritual Upacara Nangluk Merana dan Mepekelem di Pura Mas Ceti Ulun Tanjung Petitenget, Badung, bertepatan dengan Purnama Kesanga untuk memohon agar dijauhkan dari segala penyakit dan hama yang ada di dunia, baik itu di sawah

maupun di lingkungan khususnya terkait COVID-19.

“Sesungguhnya segala merana atau penyakit itu bersifat sama yang merupakan hama atau petaka bagi manusia, oleh karena itu melalui upacara Nangluk Merana ini kami berdoa bersama untuk selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang

Widhi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Eka Sudarwitha saat menghadiri ritual itu, Senin.

Ia menjelaskan, ritual itu rutin dilaksanakan setiap tahun dan tergolong dalam jenis Bhuta Yadnya yang bertujuan untuk memohon keselamatan dunia dan dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif dan mala-petaka.

Selain terkait merebaknya virus corona, menurut Eka, ritual itu juga memohon agar kasus-kasus penyakit yang mengakibatkan kematian pada hewan ternak babi di Badung dapat segera hilang dan menimbulkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Badung.

“Kami memohon agar segala hal-hal negatif seperti virus yang dapat merugikan masyarakat bisa dihilangkan dan masyarakat

kat dapat selamat dihindarkan dari penyakit dan marabahaya,” kata Eka Sudarwitha.

Selain virus, ia menjelaskan bahwa melalui ritual Nangluk Merana itu, masyarakat seperti petani yang mengandalkan kehidupannya dari pertanian diharapkan dapat terhindar dari gangguan-gangguan hama ataupun penyakit yang mengganggu tanaman pertanian.

“Sehingga nantinya mereka dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan dan dapat sejahtera,” ungkap Eka Sudarwitha.

Upacara yang dipimpin oleh Ida Pedanda Sakti Griya Telabah Banjar Batu Bidak Kerobokan Kuta Utara itu, juga dihadiri oleh Anggota DPRD Badung AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Ida Bagus Made Sunartha, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Ni Wayan Kristiani. (adv)

Badung Dukung Inovasi Dalam Layanan Administrasi Kependudukan

Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa, mendukung dan mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya warga Kabupaten Badung.

“Dengan adanya inovasi, kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan tanpa dikenakan biaya,” ujar Wabup Suiasa, saat Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sosialisasi Pindah Datang bagi Penduduk WNI/WNA tahun 2020, dalam keterangan Humas Badung yang diterima ANTARA di Mangu-pura, Rabu.

Ia mengatakan, pada era globalisasi serta kemajuan teknologi seperti yang terjadi saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat bergerak cepat, tepat dan tuntas khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, inovasi adalah kunci kemandirian suatu daerah, karena dengan adanya sebuah inovasi akan memberikan nilai tambah atau added value terhadap program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya,” katanya.

Selain inovasi pelayanan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil, Wabup Suiasa juga berharap kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung untuk membuat program/kegiatan serta inovasi-inovasi yang pro masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Badung.

“Itu akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya



Wabup Suiasa Buka Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Sosialisasi Pindah Datang Bagi Penduduk WNI/WNA 2020 bertempat di Ruang Kerta Gosana Mangupraja Mandala Puspem Badung, Selasa (10/3).

kepuasan publik,” ujar Wabup Suiasa.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, AA Ngurah Arimbawa, mengatakan melalui kegiatan itu pihaknya berharap dapat mempercepat kepemilikan dan pencatatan sipil itu dengan melakukan edukasi dan pemahaman yang akan berimplikasi pada percepatan kepemilikan dan pencatatan sipil bagi penduduk

Badung.

Sosialisasi itu juga dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta memuaskan masyarakat khususnya dalam hal sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Badung. (adv)

Pemkab Badung Bentuk Tim Atasi Penyakit Babi



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa (tengah). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fjk

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, membentuk tim penanganan penyakit babi, sebagai salah satu langkah terkait merebaknya penyakit babi di wilayah Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung.

“Kemarin kami juga telah melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas langkah-langkah penanggulangan penanganan penyakit babi ini,” ujar Kadis Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana,

di Mangupura, Kamis.

Ia menjelaskan, hingga saat ini penanganan penyakit babi di Badung terus dilakukan, salah satunya berkaitan dengan pemberian edukasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus babi tersebut

Berdasarkan hasil pendataan petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan setempat, angka kematian babi masih terus terjadi, karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat-

nya, sehingga menurut Wayan Wijana, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan kandang melalui biosecurity.

Dari kasus kematian babi tersebut, ia mengatakan juga muncul keluhan dari masyarakat terkait dengan adanya bangkai babi yang dibuang sembarangan di tempat umum, terutama di sungai dan saluran irigasi.

“Dari awal kami juga sudah menyampaikan kepada masyarakat, khususnya peternak, agar tidak membuang bangkai babi sembarangan. Lebih baik mengubur atau membakarnya. Kalau dibuang akan sangat berdampak pada percepatan proses penyebaran virus itu,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan terjadinya kasus kematian babi ini harus disikapi dengan langkah-langkah dengan cepat dan aksi nyata di lapangan.

Karena, menurutnya, wabah tersebut sudah merambah ke seluruh wilayah dengan kematian yang cukup tinggi, terlebih banyaknya bangkai babi yang dibuang sembarangan.

“Kondisi ini harus disikapi dengan bijak dan tidak perlu saling menyalahkan. Untuk penanganan kasus ini saya menekan perlu adanya koordinasi dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badung salah satunya dengan pembentukan Tim Penanganan Penyakit Babi ini,” katanya.

Pihaknya berharap, dengan adanya tim penanganan tersebut, diharapkan penanganan khusus kematian babi di Badung dapat dilakukan dengan cepat dan aman.

“Kami juga perlu memikirkan program recovery atau pemulihan misalnya nanti ada bantuan bibit babi kepada masyarakat yang kena musibah kematian babi,” ujar Wabup Suiasa. (adv)

Kemenpan-RB lakukan ‘Benchmarking’ Standar Pelayanan Publik di Badung

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik bersama peserta Sosialisasi dan Bimtek Standar Pelayanan Publik bagi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus dan Tujuan Wisata Internasional melakukan Benchmarking atau mengukur dan membandingkan kinerja terhadap implementasi standar pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Badung, Bali.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang komprehensif tentang peningkatan kualitas pelayanan publik pada daerah-daerah yang berkarakter khusus, baik dari sisi teoritis dan dasar hukum maupun dari sisi best practice,” ujar Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller, di Mangupura, Kamis.

Ia menjelaskan, program kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk bagaimana mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan daerah tujuan pariwisata dengan Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung menjadi referensi dan lokus pelaksanaan bimbingan teknis.

“Kegiatan ini kami laksanakan di wilayah Badung karena jajaran pemerintahan Badung kami nilai memiliki karakter dan komitmen yang sangat kuat untuk memberikan pelayanan publik yang baik,” katanya.

Ia berharap, dengan dilaksanakan sosialisasi tersebut daerah peserta dapat memberikan pelayanan yang baik dan mencontoh agar dapat memberikan proses layanan yang lebih cepat. “Kami dari Kementerian PAN-RB akan mempersiapkan dan membantu memfasilitasi terkait dengan sistem-sistem yang ter-



Sejumlah peserta mengikuti rangkaian Sosialisasi dan Bimtek Standar Pelayanan Publik bagi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus dan Tujuan Wisata Internasional di Puspem Badung, Kamis (12/3). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fjk

kait dengan teknologi informasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, peserta yang berjumlah 69 orang dari perwakilan Pemda dan Polres Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Berau dan Kabupaten Manggarai Barat melakukan peninjauan atau studi banding proses pelaksanaan pelayanan publik di

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.

Kepada para peserta, Kepala DPMPSTP Badung, I Made Agus Aryawan, berbagi pengalamannya terkait bagaimana membentuk Mal Pelayanan Publik dan bagaimana melakukan suatu perubahan yang dimulai dari paradigma sumber daya manusia, peningkatan kinerja dan integritas. (adv)

Sekda Gianyar Pantau Ruang Isolasi RSUD Sanjiwani untuk COVID-19



Sekda Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya (tengah) memantau langsung persiapan ruang isolasi di RS Sanjiwani Gianyar. (Dok Humas)

Bupati Gianyar Mahayatra memerintahkan Sekda Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya untuk memantau persiapan ruang isolasi di RS

Sanjiwani Gianyar, yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu RS rujukan perawatan pasien dalam pengawasan virus Corona atau COVID-19 di Bali.

Saat mengunjungi RS Sanjiwani di Gianyar, Rabu, Sekda Wisnu Wijaya menuturkan, ruang isolasi akan dipersiapkan dengan baik.

“Mau tidak mau karena ditunjuk, di satu sisi menjadi kebanggaan karena ini berarti kita dipercaya mampu, nsmun disisi lain kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya,” tu-

turnya.

Tiga Rumah Sakit di Bali yang ditunjuk sebagai RS rujukan perawatan pasien dalam pengawasan Corona adalah RS. Sanglah, RS Sanjiwani Gianyar dan RS. Tabanan. Pemprov Bali sendiri telah menunjuk RS PTN Unud sebagai tempat isolasi bila terjadi peningkatan kasus.

Sampai saat ini persiapan masih terus dilaksanakan dan diperkirakan selesai Kamis, (5/3).

“Sampai saat ini kita sudah siap, dan semoga Kamis (5/3) siap digunakan. Saya sudah ketemu dengan yang mengerjakan, karena ini dadakan, tapi semoga hari itu semua siap digunakan,” janji Wisnu Wijaya.

Sekda Wisnu Wijaya mengatakan sampai saat ini Gianyar masih negatif kasus corona. “Kemarin memang sempat

ada kekhawatiran karena adanya WNA yang dirawat dalam pengawasan. WNA tersebut memeriksakan diri ke RSUD Sanjiwani atas inisiatifnya sendiri.

“Karena WNA mendesak ingin dilayani, ya kita layani karena tidak boleh menelantarkan pasien karena dapat melanggar undang-undang kesehatan, hari ini kondisinya sudah membaik, hasil lab keluar besok, akan dipulangkan kalau hasilnya negatif,” kata Wisnu Wijaya.

Sekda Gianyar Wisnu Wijaya berharap masyarakat bersamasama meleak informasi dan tidak menyebar hoaks.

Selain itu, Wisnu Wijaya mengimbau seluruh tenaga kesehatan di Sanjiwani maupun seluruh puskesmas yang ada di Gianyar agar melayani pasien dengan sebaik-baiknya dan tidak menolak pasien. (ant)

Kejari - Perbekel Se-Gianyar Tanda Tangan “MoU” Dana Desa

Kejaksanaan Negeri kabupaten Gianyar, Bali, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh kepala desa (perbekel) guna mencegah penyalahgunaan dana desa.

“Pelaksanaan nota kesepahaman ini sebagai komitmen Kejaksanaan RI memberikan dukungan kepada pemerintahan desa untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan,” ujar Kepala Kejaksanaan Negeri Gianyar, Agung Mardiwibowo, saat memberikan sambutan, sebagaimana siaran pers Diskominfo Gianyar, Jumat.

Perbekel se-Kabupaten Gianyar kini mendapat pendampingan Kejaksanaan Negeri Gianyar dalam menggunakan dana desa, kata Kejari Gianyar, saat Penandatanganan nota kesepahaman di bidang Keperdataan dan Tata Usaha Negara, antara Perbekel dengan Kejaksanaan Negeri Gianyar pada Kamis (12/3) di Balai Budaya Gianyar.

Penandatanganan dihadiri

perbekel (kepala desa) se-Kabupaten Gianyar, Kejaksanaan Negeri, organisasi perangkat daerah dan pihak terkait lainnya. Setelah penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan sosialisasi jaksa pengacara negara oleh Kasi Datun Kejari Gianyar Martina P, SH.MBA kepada 64 perbekel se-Kabupaten Gianyar.

Dengan pendampingan tersebut, kata Agung Mardiwibowo, pemerintah desa bisa memanfaatkan jasa hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengawal pemanfaatan dana desa agar selalu tepat sasaran. Sebab banyaknya sumber dana yang masuk desa tentu rentan terjadi penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dukungan diberikan jika terkait masalah hukum. Sebab, dalam menjalankan roda pemerintahan desa tentu ada saja permasalahan yang dihadapi.



Kejaksanaan kabupaten Gianyar melakukan penandatanganan MOU dengan seluruh kepala desa (perbekel). Foto Humas Gianyar

“Jika ini terjadi maka jasa hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat dimanfaatkan sebagai solusi pemecahan masalah,” imbuh dia.

Sementara Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Mayun membacakan sambutan Bupati Gianyar, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai langkah pencegahan dari pemerintah daerah, pihak kejaksanaan dan pihak terkait untuk memberi-

kan rasa aman bagi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengingat desa mendapat dana desa yang setiap tahun meningkat.

Bupati Gianyar juga mengajak semua perbekel melaksanakan tata kelola keuangan desa khususnya dana desa agar sesuai dengan ketentuan. Apalagi tahun 2020 dana desa di Gianyar pertama kali cair 60 persen sebesar Rp37 miliar ke rekening kas desa. (ant)

900 Seniman-Penari Tampil Dalam Pembukaan Tanah Lot Art-Food Festival 2020



Penampilan 900 seniman dan tari dalam pembukaan Tanah Lot Art and Food Festival 2020 di Tabanan, Bali, Jumat (13/3/2020) (Antara/Ayu Khania Pranisitha)

Sebanyak 900 seniman dan penari dari tujuh banjar di desa Pekraman Kediri, Tabanan, Bali, tampil dengan suguhan pagelaran Okokan Kolosal bertema 'Nangluk Merana' dalam pembukaan Tanah Lot Art and Food Festival 2020.

"Okokan sebagai ikon dalam pementasan festival ini dengan

fragmen tari nangluk merana bertujuan menetralkan hal-hal jahat atau negatif sehingga mampu membawa kedamaian," kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat memberikan sambutan pada festival Tanah Lot di Tabanan, Jumat.

Apalagi saat ini, industri pariwisata diguncang kejadian

merebaknya wabah virus Corona (COVID-19) yang terjadi dimana-mana. "Tentunya saya yakin dengan kekuatan skala niskala dan niat kita, virus ini akan hilang di tanah suci Bali ini. Kita doakan bersama-sama," katanya.

Ni Putu Eka Wiryastuti yang juga selaku Ketua Badan Pengelola DTW Tanah Lot menjelaskan pergelaran Okokan kolosal dengan Nangluk Merana ini merupakan pertunjukan tradisi yang memiliki makna untuk mengusir bala atau musibah, seperti penyakit, hama, bencana dan sejenisnya.

"Ini digaungkan dengan harapan agar dunia segera mampu melepaskan diri dari wabah virus Corona. Dengan menampilkan Okokan kolosal ini, mudah-mudahan ini sedikit tidaknya membawa dampak yang baik bagi kita di Bali dan Tabanan

khususnya," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan program pemerintah, yakni We Love Bali Movement.

"Dan menjadi lebih luar biasa lagi ketika acara ini dilakukan di tengah hiruk-pikuk berita yaitu tentang virus Corona. Ini sangat menarik sekali," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa penampilan dalam festival ini tidak hanya ditujukan untuk pariwisata, melainkan mengandung unsur spiritual sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Tema yang diusung ini tepat untuk dilaksanakan ditengah Bali yang saat ini memang masih baik-baik saja. Hanya pemberitaan di luar negeri sedemikian rupa membawa dampak kekawatiran," ucapnya. (ant)

TPID Bangli Dengan Lombok Barat Kerja Sama Pemasaran dan Distribusi Pangan



Bupati Bangli I Made Gianyar dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengadakan kerjasama (MoU) terkait pemasaran dan distribusi pangan. (Foto Humas Bangli)

Dalam upaya memantapkan aksestabilitas pangan bagi masyarakat, dan sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat, Kabupaten Bangli gelar Penandatanganan kerjasama (MoU) antara TPID Bangli dengan Lombok Barat terkait pemasaran dan distribusi pangan kedua daerah.

"Kita ketahui Bangli dan Lombok sebenarnya dilihat dari alur distribusi hasil pangan sudah terjalin di ma-

sarakat namun memang secara formal belum dilakukan oleh karena itu hal ini adalah langkah positif untuk kita saling mendukung dan menjaga kestabilan baik kesediaan dan kebutuhan pangan di daerah masing masing," kata bupati Bangli I Made Gianyar, dalam siaran persnya di Bangli, Minggu.

Acara penandatanganan kerjasama itu berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati di

Giri Menang, Rabu (26/2/20).

Bupati Bangli menambahkan prinsipnya manusia itu tidak bisa maju sendiri, orang itu pasti maju bersama sama, kewajiban pemerintah termasuk bupati dalam hal ini selalu berkeinginan masyarakatnya sejahtera masyarakatnya.

Bagaimana agar masyarakatnya bahagia dan sejahtera dalam bahasa ekonomi disebutkan yang pertama urusan hidup itu adalah urusan produksi/urusan hasil, apabila sudah dapat menikmati hasil atau produksi, dan produksi itu berlebih maka hasil lebih itu harus terdistribusi di pasar, sehingga terjadilah pertemuan antara konsumen dan produsen yang difasilitasi oleh pasar.

Tujuan kita ke sini adalah keyakinan bahwa tuhan itu menciptakan alam beserta isinya dengan berbeda-beda dan begitu juga alam akan menghasilkan yang berbeda.

Sehingga apa yang dihasilkan oleh Kabupaten Bangli dan Lombok barat tentu akan berbeda sehingga yang tidak dihasilkan di Kabupaten Bangli dan dihasilkan oleh Lombok barat, tentunya kita akan bangun kerjasama sehingga kedepan kerjasama antar masyarakat yang sudah berjalan seperti telur yang dihasilkan di Bangli juga sudah banyak disalurkan di Lombok begitu juga sebaliknya untuk pakan ayam juga sudah disalurkan dari Lombok ke Bangli, kata I Made Gianyar.

Sementara itu Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan ke Lombok Barat, tentu banyak hal yang dapat kita berbagi, baik itu strategi dan upaya-upaya untuk tetap menjaga keseimbangan pangan baik itu di Lombok Barat dan Kabupaten Bangli. (ant)

Bupati Klungkung Minta Pariwisata Tidak Kendor Saat COVID-19



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memimpin apel paripurna di Lapangan Puputan Klungkung (2/3/2020). (Foto Antaranews Bali/HO-Humas Klungkung/2020)

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak kendor dan bahkan melakukan langkah-langkah untuk membenahi sektor pariwisata saat terjadi wabah virus Corona atau COVID-19 sejak akhir Desember 2019 hingga kini.

“Jangan kendor, fokus pada sektor pariwisata, berikan daya dukung kepada sektor pariwisata,” katanya dalam apel paripurna di Lapangan Puputan Klungkung

(2/3) sebagaimana keterangan pers Humas Pemkab Klungkung yang diterima, Selasa.

Selaku Pembina Apel, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengingatkan kepada seluruh ASN dan masyarakat untuk waspada terhadap virus Corona, namun tetap melakukan pembangunan sektor pariwisata melalui dukungan seluruh OPD.

“Saat situasi sekarang jangan mengendorkan pekerjaan, malah pekerjaan harus ditingkatkan

dengan penataan infrastruktur dan pemberdayaan, sehingga jika situasi sudah kembali normal akan siap dengan infrastruktur dan pelayanan,” katanya.

Terkait Pajak Hotel dan Restoran sekarang ini, meskipun ada kebijakan insentif dari pusat, namun pihaknya mengaku akan tetap melakukan antisipasi. Kegiatan akan disusun dengan skala prioritas sehingga kepentingan masyarakat dan prioritas lainnya tidak tertunda.

Dalam apel itu, Bupati juga menyoroti disiplin dan penampilan para ASN agar berpakaian rapi dan sopan sesuai aturan Permendagri Nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian Dinas ASN- PNS. Selain itu, ASN juga dilarang untuk mewarnai rambut dengan warna tidak alami.

“Jangan gunakan pernak pernik berlebihan dan mewarnai rambut dengan warna yang tidak alami seperti seorang selebritis yang akan tampil dalam pertunjukan,” katanya sambil memberi

perintah kepada Tim Gerakan Disiplin Nasional setempat.

Saat apel tersebut juga diserahkan penghargaan kepada anggota Korpri yang akan menjalani masa pensiun per 1 Maret 2020, diantaranya Ir. Ida Kade Arga, MM., Drs. Ida Bagus Kade Sweden, M.Ag., I Wayan Sudiarta dan NN. Dewa Ayu Oka Ariani A.Md.,Keb.

Sementara itu, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta ketika mengunjungi Kantor Pertanian dan Pertenakan mengingatkan agar selalu semangat dan sikap disiplin dalam menjalankan bertugas, Kunjungan itu dilakukan untuk mengetahui disiplin OPD pasca-libur Galungan-Kuningan.

Dalam kunjungannya tersebut, Wabup Made Kasta mengecek kehadiran absen para pegawai, “Setelah saya cek absennya ternyata banyak yang hadir, mudah-mudahan kedepan kehadiran dan kedisiplinan kerja tetap dijaga dengan baik,” ujar Wabup Kasta. (ant)

Pemkab Klungkung Kembangkan Arak Khas Bali di Desa Besan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung akan mengembangkan Industri Rumah Tangga penghasil arak khas Bali di Desa Besan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi, serta memasarkan produknya lewat Bumdes untuk disalurkan ke hotel dan restoran.

“Kedepannya, Industri Rumah Tangga yang memproduksi Minuman Fermentasi khas Bali harus ditampung dan produknya dapat dipasarkan melalui BumDes yang terdapat di Desa Besan,” kata Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta dalam keterangan pers yang diterima, Senin.

Saat meninjau Industri Rumah Tangga penghasil Arak Bali di Bukit Abah, Desa Besan, Klungkung (7/3), ia juga mengharapkan dinas terkait

dan BPOM bisa mengontrol produksi Minuman Fermentasi Khas Bali dari Industri Rumah Tangga di Desa Besan itu.

“Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya Pergub tersebut, masyarakat Klungkung yang mengandalkan mata pencaharian melalui produksi minuman Fermentasi Khas Bali bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Disela-sela peninjauan itu, Perbekel Desa Besan I Ketut Yasa menyampaikan ucapan terima kasih terkait terbitnya Pergub Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

“Dengan legalnya Arak Bali ini, warga Besan yang bergantung perekonomian keluarga dengan memproduksi minuman Arak Bali kini dapat bernapas lega,” katanya tentang desanya yang memiliki 17 KK



Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta meninjau Industri Rumah Tangga penghasil Arak Bali di Bukit Abah Desa Besan pada Sabtu (7/3/2020). (Foto Antaranews Bali/Nyoman Aditya/2020)

yang memiliki mata pencaharian dengan memproduksi Arak Bali.

Ia berjanji perangkat desa akan menampung hasil produksi Industri rumah tangga masyarakat di Desa Besan yakni Arak Bali dan akan disalurkan melalui Bumdes ke restoran dan hotel di sekitar Bali.

Sementara itu, salah seorang pemilik Industri Rumah Tangga Minuman Fermentasi Khas Bali, Nengah Puspawati, menyampaikan rasa terima kasih, karena terbitnya Pergub Nomor 1 Tahun 2020 membuatnya lebih tenang dalam memproduksi dan memasarkan Minuman Fermentasi Khas Bali. (ant)

Pemkab Buleleng Simulasikan Penanganan COVID-19



Dirut RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana, M.Kes disela-sela simulasi penanganan pasien terjangkit Virus Corona atau COVID-19 di RSUD Buleleng pada Selasa (10/3/2020). (Antara News Bali/Made Adnyana/2020)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengadakan simulasi penanganan pasien terjangkit Virus Corona atau COVID-19 di RSUD Buleleng.

Dirut RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana, M.Kes dalam keterangan pers, Rabu, menjelaskan alur yang diperagakan dalam simulasi pada Selasa (10/3) itu harus sesuai Standar Operasional Prosedur

(SOP), seperti pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan alat medis lain.

Pasien yang dicurigai akan diberikan beberapa pertanyaan dasar mulai dari kapan gejala muncul dan riwayat bepergian pasien. Tapi jika setelah pasien diperiksa dan hasilnya negatif, pasien akan dipulangkan. Namun, akan tetap dilakukan pen-

gawasan selama dua minggu oleh petugas kesehatan.

“Pasien yang dipulangkan akan disarankan untuk tidak keluar rumah selama dua minggu, dan petugas akan melakukan pengecekan kesehatan seperti suhu tubuh dan lainnya,” jelasnya.

Simulasi ini merupakan respons setelah ditemukannya pasien terjangkit COVID-19 di Indonesia. Kendati di Buleleng belum ada pasien yang terpapar dengan virus tersebut, namun sebagai Rumah Sakit yang mendapat pelatihan khusus penanganan pasien virus itu di Kementerian Kesehatan, berbanding perlu untuk melakukan simulasi penanganan pasien.

Dalam simulasi tersebut, para petugas RSUD Buleleng mulai dari sopir ambulans hingga dokter memperagakan cara-cara penanganan pasien sesuai standar yang sudah diberikan saat pelatihan. Mereka menggunakan pak-

aiian khusus mirip astronot untuk menangani pasien yang diduga terpapar virus itu. Pakaian yang bernama Hazmat Suit ini merupakan pakaian wajib yang harus digunakan oleh petugas. Pasien tersebut lalu dibawa ke ruang isolasi dan dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG menjelaskan, RSUD Buleleng sudah memiliki 10 tempat tidur untuk pasien terpapar virus itu di ruang isolasi. Ruangan isolasi itu juga dilengkapi dengan alat medis yang sudah sesuai standar World Health Organization (WHO).

Wabup Sutjidra menambahkan, RSUD Buleleng sudah sangat siap menangani jika ada pasien yang terjangkit virus corona. Ia mengatakan, prosedur tetap (protap) yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. (ant)

Pemkab Buleleng Semprotkan Disinfektan di Ruang Publik

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali melakukan penyemprotan cairan disinfektan di ruang-ruang publik atau tempat-tempat umum di kota setempat untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19, Minggu.

“Penyemprotan disinfektan bertujuan memotivasi seluruh warga Kabupaten Buleleng waspada terhadap penyebaran COVID-19,” kata Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana di Buleleng.

Sejumlah tempat umum yang disasar pemkab setempat untuk dilakukan penyemprotan drsinfektan seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Gedung Laksmi Graha, Pantai Binaria dan sejumlah tempat umum lainnya.

Ia mengatakan kegiatan itu merupakan momentum awal untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan merebaknya COVID-19 yang mulai meresahkan masyarakat di daerah itu.

Pihaknya pun mendorong Kepala Dinas Kesehatan untuk langsung melakukan penyemprotan lanjutan di berbagai tempat dengan keramaian lain seperti sekolah dan tempat ibadah. “Saya sudah instruksikan segera melakukan penyemprotan juga di tempat-tempat seperti sekolah dan masjid,” katanya.

Terkait hal sosialisasi, pihaknya telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng untuk memanggil seluruh kepala sekolah untuk menyosialisasikan terkait kebersihan tangan dan gaya hidup sehat untuk meningkatkan imun tubuh.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk di lingkungan pendidikan dimulai dari sekolah-sekolah,” tambah Agus seraya mengungkapkan instruksi itu juga merupakan pesan kepada masyarakat bahwa hal tersebut merupakan langkah penting.

Pemkab, katanya, juga su-



Tim gabungan Pemkab Buleleng, Provinsi Bali melakukan penyemprotan cairan disinfektan di wilayah Patung Dolpin dekat Pantai Binaria, kawasan objek wisata Pantai Lovina, Minggu (15/3/2020). (FOTO ANTARA/BA Purnomo)

dah berkoordinasi dengan masing-masing camat untuk menyediakan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di wilayahnya masing-masing.

Terkait fakta sejumlah daerah yang telah meliburkan siswanya diganti dengan belajar mandiri, bupati belum berencana melakukan hal serupa. Ia masih fokus pada upaya pencegahan sembari segera akan melakukan

rapat bersama Disdik dan kepala sekolah seluruh Buleleng.

“Saya akan undang seluruh kepala sekolah yang ada terkait meliburkan siswa. Saya ingin mendengar masukan dari mereka. Sembari juga saya akan berkoordinasi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster agar tidak terkesan mengambil langkah sendiri di kabupaten,” kata Putu Agus Suradnyana. (ant)

BI: Bali Jadi Contoh Pelaksanaan Edukasi QRIS Nasional



Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, berfoto bersama anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Direktur BPD Bali I Made Lestara, dan petugas perpustakaan BI Corner Undiksha di BI Corner Undiksha (Antara/Ni Luh Rhisma)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan Bali telah dipilih untuk menjadi model edukasi “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)” secara nasional.

“Pemilihan Bali jadi model edukasi QRIS oleh BI Kantor Pusat karena menggunakan to-

koh-tokoh pejabat dan UMKM mulai dari skala kecil hingga besar dan penetrasinya di Bali cepat sekali, tiada hari tanpa QRIS,” kata Trisno disela-sela acara peluncuran penggunaan QRIS di BI Corner Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Kamis.

Saat ini, Bali telah menduduki posisi nomor tujuh penggunaan QRIS terbanyak di Indonesia. Hingga awal Maret 2020, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat sudah lebih dari 65 ribu merchant.

Merchant tidak hanya pedagang, tetapi juga tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan sekolah/universitas hingga destinasi wisata. Selain itu, 260 QRIS juga telah terpasang di seluruh wilayah Bali sebagai wadah donasi digital.

“Kami semua menyebut tagline-nya meng-QRIS-kan Bali, meng-QRISK-kan Denpasar, Buleleng, Karangasem dan hampir semua pojok Bali sehingga menjadi salah satu contoh ‘Bali in one hand in QRIS,’” ucap Trisno sembari menyampaikan terima kasih kepada media yang sangat membantu menyosialisasikan QRIS di Bali.

Menurut Trisno, perguruan

tinggi menjadi salah satu komunitas penting yang dibidik untuk sosialisasi QRIS karena generasi milenial akan lebih mudah menyerap dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau semakin banyak generasi milenial di Bali mengenal QRIS, tentu akan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Trisno mengatakan BI Corner di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, merupakan satu-satunya BI Corner di Bali yang menggunakan QRIS untuk transaksi.

“Ini bisa menjadi nilai plus untuk lomba QRIS tingkat nasional. Jadi, tolong para pengelola aktif melibatkan masyarakat di sini,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mengaku salut pada Undiksha dalam mengembangkan BI Corner yang disinergikan pemanfaatan QRIS. (ant)

Mahasiswa Undiksha Ciptakan Alat Kontrol Listrik Jarak Jauh

Tim mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, menciptakan aplikasi alat kontrol listrik yang dapat digunakan mematikan maupun menghidupkan listrik melalui link SMS.

Salah seorang dari mahasiswa itu, Kadek Reda Setiawan Suda, di Singaraja, Kamis, menjelaskan tim mahasiswa itu terdiri dari dirinya, I Gede Ardi Darmawan dan Putu Zasia Eka Satya. Mereka itu tergabung dalam satu tim yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan.

“Karya inovatif itu juga kami ikutsertakan dalam lomba yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Negeri Yogyakarta, pada 5-6 Maret 2020 dan berhasil menyabet juara II. Kami bersaing dengan perguruan tinggi yang dianggap unggulan. Yang sudah sempat lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS),” katanya.

Mahasiswa asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini menjelaskan aplikasi itu dapat digunakan dari jarak jauh karena berbasis SMS, yang didahului dengan pemasangan panel kontrol pada jaringan listrik rumah. “Kalau misalnya nyetrika, terus lupa nyabut. Itu kan bahaya. Nah..melalui aplikasi ini, kita bisa mematikan listrik secara keseluruhan dari jauh. Bisa juga untuk beberapa titik. Tinggal di-setting saja,” jelasnya.

Menciptakan alat itu hanya butuh waktu sekitar satu minggu. Meski sudah lolos kompetisi, tetap dilakukan penyempurnaan. “Kami inginnya aplikasi ini bisa menggunakan internet. Tidak lagi dengan SMS saja. Kami masih mencari cara,” katanya.

Menanggapi karya mahasiswa itu, Wakil Rektor III Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd, mengatakan kelalaian terhadap penggunaan listrik oleh masyarakat memang ma-



Tim mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, menciptakan aplikasi alat kontrol listrik yang dapat digunakan mematikan maupun menghidupkan listrik melalui link SMS. (Antara News Bali/HO-Humas Undiksha/2020)

sih sering terjadi. Bahkan hal demikian berpotensi memicu konsleting. Hal itulah yang menjadi inspirasi dari tim mahasiswa itu menciptakan aplikasi kontroler listrik. “Ini bagus untuk terus dikembangkan. Karena bisa memecahkan persoalan di masyarakat,” ucapnya.

Suastra mengatakan, pascadilombakan karya ini perlu dipatenkan dan dicarikan Hak

Kekayaan Intelektual. Dari hal itu akan mempermudah dalam pengembangannya, termasuk menjalin kerja sama dengan perusahaan. “Saya akan mendorong dan mengawal, agar LPPM membantu mengurus Hak Kekayaan Intelektual. Setelah itu akan dipromosikan. Dengan ini, Undiksha juga akan terdongkrak,” kata akademisi bidang Fisika ini. (ant)



PLN Bali Berikan Kemudahan Masyarakat Lewat Program “Dilan”

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN UID) Bali melakukan terobosan dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat dengan program “Dilan” atau diberi cicilan bagi pasang baru, sehingga tak ada lagi warga menggunakan daya listrik menumpang di tetangga atau keluarga.

“Dengan program ‘Dilan’ tersebut akan memberikan keringanan kepada masyarakat yang membutuhkan daya listrik,” kata Manajer Komunikasi PLN UID Bali I Made Arya di Denpasar.

Ia mengatakan program “Diberi Cicilan” bagi masyarakat yang ingin pasang baru listrik. Dilan yang telah diperkenalkan sejak Februari hingga akhir tahun 2020 tanpa “down payment” (uang muka).

Made Arya lebih lanjut mengatakan program “Dilan” ini berlaku untuk pemasangan listrik dengan daya 450 VA hingga 1.300 VA.

“Untuk pasang baru, sistem membayar cicilannya bisa dilakukan sampai maksimal 12 kali selama tahun 2020. Semua ini bertujuan membantu masyarakat yang masih menumpang listrik di tetangga maupun keluarga,” katanya.

Ia mengatakan rasio elektrifikasi sudah 100 persen, namun masih ada beberapa warga yang listriknya numpang ke tetangga atau saudara terdekat.

Made Arya menjelaskan bagi warga yang berminat dengan program tersebut bisa datang ke kantor PLN terdekat dan meminta program cicilan ini. Mengenai harga pasang baru untuk daya 450 VA, biaya penyambungan sebesar Rp421 ribu, dan cicilannya mulai dari dua kali hingga maksimal 12 kali cicilan.

“Program “Diberi Cicilan” bagi masyarakat yang ingin pasang baru listrik. Dilan diperkenalkan sejak Februari hingga akhir tahun 2020 tanpa



Manajer Komunikasi PLN UID Bali I Made Arya. (AntaraneWS/Komang Suparta/IST/2020)

“down payment” (uang muka). Program “Dilan” ini berlaku untuk pemasangan listrik dengan daya 450 VA hingga 1.300,” terangnya.

Sedangkan untuk daya 900 VA, biaya penyambungan sebesar Rp843 ribu, dan daya listrik

1300 VA biaya penyambungan Rp 1,218 juta. Untuk yang pasang baru dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA subsidi, hanya dapat diberlakukan untuk calon pelanggan yang masuk dalam daftar TNP2K/BDT. (ant)